

DAMPAK PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KEMISKINAN PADA SEPULUH KABUPATEN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN

Akhmad

*Dosen Kopertis Wil.IX Sulawesi Dipekerjakan pada STIE-YPUP Makassar
akhmad09@yahoo.co.id*

ABSTRAK

Kemiskinan sampai saat ini masih dianggap sebagai persoalan ekonomi yang serius. Oleh karena itu keberpihakan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam menanggulangi kemiskinan mutlak diperlukan. Bentuk keberpihakan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan fiskal, berupa pengeluaran pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah diperolehnya suatu model ekonometrika dampak pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota serta simulasi kebijakan yang menggambarkan perilaku dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan. Penelitian ini dilakukan pada 10 kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan, dengan menggunakan data panel (yaitu gabungan antara data *time series* tahun (2004- 2012) dan data *cross section* 10 kabupaten kota. Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model sistem persamaan simultan yang dibangun dibagi ke dalam tiga belok yaitu fiskal, (2) permintaan agregat, dan (3) kinerja perekonomian. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta. Selanjutnya investasi swasta berpengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan pada 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM), investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun hanya indeks pembangunan manusia yang berpengaruh nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Sementara jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, sementara belanja sosial berpengaruh positif namun tidak nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa, belanja sosial yang digunakan oleh pemerintah daerah paling tidak banyak yang tidak tepat sasaran.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejak tahun 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru penyelenggaraan pemerintahan, ketika diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, yang selanjutnya direvisi dengan

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004

Dalam era otonomi daerah dewasa ini, pemerintah daerah memiliki wewenang yang hampir penuh atas penggunaan sumber-sumber fiskal mereka. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota, saat ini mengelola sekitar 36 persen dari total pengeluaran publik, dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan 1990-an yang hanya berjumlah sekitar 24 persen (World Bank. 2007).

Kebijakan fiskal adalah bentuk intervensi pemerintah untuk

mempengaruhi jalannya perekonomian dengan maksud agar keadaan perekonomian tidak terlalu menyimpang dari keadaan yang diinginkan dengan alat (*policy instrument variable*) berupa Pajak (T), Transfer Pemerintah (Tr), dan Pengeluaran Pemerintah (G). Kebijakan fiskal disebut juga kebijakan anggaran (*budgetary policy*), dilakukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), (Romer, 2001; McCann, 2001; Dornbusch *at al.* 2008).

Provinsi Sulawesi Selatan adalah provinsi yang terletak di sebelah selatan Pulau Sulawesi dengan luas daratan 45 574.48 km persegi, meliputi 21 kabupaten dan tiga kota, dengan jumlah penduduk sebesar 8 032 551 jiwa berdasarkan sensus penduduk tahun 2010, merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan timur Indonesia. Kondisi perekonomian kabupaten kota di Propinsi Sulawesi Selatan dewasa ini masih didominasi oleh sektor pertanian, karena menyediakan lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk. Pada tahun 2011 tenaga kerja yang terserap pada sektor pertanian sebesar 49.20 persen, dan penyumbang 29 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Provinsi Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di kawasan timur Indonesia, dengan sebagian besar penduduknya hidup pada sektor pertanian, belum dapat melepaskan diri dengan persoalan kemiskinan. Data badan pusat statistik Provinsi Sulawesi Selatan (2012) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di daerah ini masih tinggi yaitu 10,29 persen atau

sebesar 832.910 jiwa pada tahun 2011, dari jumlah tersebut lebih dari 80 persen atau sebesar 695.890 jiwa berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama sektor pertanian, dan sisanya 137.020 jiwa berada di perkotaan. Walaupun angka kemiskinan ini dibawah tingkat rata-rata kemiskinan nasional 12.49 persen, namun tetap menjadi persoalan serius dan membutuhkan keberpihakan dari pemerintah kabupaten dan kota dalam upaya menanggulangi kemiskinan di didaerhnya.

Suatu hal yang perlu diperhatikan bahwa untuk dapat merumuskan program yang efektif, untuk mengurangi sumber-sumber kemiskinan, maka lebih dahulu diperlukan pengetahuan yang mendalam mengenai siapa saja yang masuk dalam kelompok miskin itu, termasuk ciri-ciri mereka.

Todaro dan Smith (2009) mendeskripsikan dengan sangat baik siapa sesungguhnya kaum miskin (*the poor*) yaitu mereka ini berjumlah lebih dari 6 milyar jiwa, nasibnya jauh kurang beruntung karena sehari-harinya harus hidup dalam kondisi kekurangan. Mereka tidak memiliki rumah sendiri, dan walaupun punya, ukurannya begitu kecil. Persediaan makanan juga acapkali tidak memadai. Kondisi kesehatan mereka umumnya tidak begitu baik atau bahkan buruk, dan banyak dari mereka yang buta huruf, serta menganggur. Masa depan mereka untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih baik biasanya suram, atau sekurang-kurangnya tidak menentu.

Sejalan dengan hal tersebut Gemmel, (1992); dan Sen, (2002) melihat kemiskinan dari perspektif yang lebih luas yaitu minimnya penghasilan, tidak tersedianya akses kepada pengetahuan, sumber daya, serta layanan sosial dan kesehatan, keterasingan dari arus utama pembangunan dan ketidak mampuan memenuhi kebutuhan pokok. Dengan perspektif ini minimnya penghasilan hanyalah merupakan salah satu unsur, yang lebih mendasar adalah ketidakmampuan untuk mengakses sumber-sumber ekonomi.

Penelitian tentang kebijakan fiskal di Indonesia dalam era otonomi daerah telah dilekukan oleh; Yudhoyono (2004), Usman (2006) dan Akhmad, et.al (2012) menemukan bahwa kebijakan fiskal daerah dari sisi penerimaan yaitu dengan meningkatkan sumber-sumber penerimaan berupa pajak daerah dan retribusi daerah, kurang memberi pengaruh langsung terhadap kemiskinan. Sementara peningkatan pengeluaran pada sektor pertanian berdampak pada peningkatan PDRB sektor pertanian selanjutnya meningkatkan kinerja ketahanan pangan, dan menurunkan kemiskinan, serta meningkatkan kinerja fiskal daerah.

Oleh karena itu menarik mengetahui bagaiman keberpihakan pemerintah kabupaten dan kota terhadap penduduk miskin dengan melakukan penelitian tentang dampak pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Permasalahan Penelitian

1. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah daerah terhadap kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

Urgensi Penelitian

Dalam era otonomi daerah dewasa ini, maka peran dan tanggung jawab pemerintah daerah semakin besar termasuk di dalamnya bagaimana menanggulangi kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu penelitian dimaksudkan merumuskan suatu model ekonometrika yang menggambarkan tentang dampak pengeluaran pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap kemiskinan.

Setelah model ekonometrika tentang dampak pengeluaran pemerintah ditemukan, maka selanjutnya dilakukan simulasi alternatif kebijakan yang dapat dijadikan sebagai alternatif kebijakan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di daerahnya.

Ruang lingkup analisis dalam penelitian ini mencakup sepuluh kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan *data panel* yaitu gabungan antara data *time series* tahun (2007-2012) dan data *cross section* 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan.

Untuk memperoleh hasil yang lebih baik, dipandang perlu untuk menghilangkan pengaruh volatilitas nilai tukar rupiah dan inflasi, maka digunakan harga

konstan tahun 2000. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis ekonometrika dengan sistem persamaan simultan.

Tujuan Penelitian

1. Diketahuinya Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada 10 Kabupaten (Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Barru, dan Pangkep). tahun 2001-2011.
2. Diperolehnya suatu model ekonometrika dan hasil estimasi model pengeluaran pemerintah daerah pada 10 kabupaten yang diteliti.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Suber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi antara lain, pengeluaran pemerintah daerah, penerimaan pemerintah daerah, jumlah angka kemiskinan, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto dan beberapa data lainnya pada 10 kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Data tersebut diperoleh dari BPS Nasional, BPS Provinsi Sulawesi Selatan, BPS Kabupaten dan Kota, Kementerian Keuangan, dan pemerintah daerah tingkat dua.

Spesifikasi Model

Model yang baik haruslah memenuhi kriteria teori ekonomi (*theoretically meaningful*), kriteria statistika yang dilihat dari suatu derajat ketepatan (*goodness of fit*) yang dikenal dengan koefisien determinasi (R^2) serta nyata secara statistik (*statistically significant*), serta kriteria ekonometrika yang

menetapkan apakah suatu taksiran memiliki sifat-sifat yang dibutuhkan seperti *unbiasedness*, *consistency*, *sufficiency*, dan *efficiency*. Statistik D_w adalah suatu kriteria ekonometrika yang digunakan untuk menguji taksiran, yaitu menguji validitas dari asumsi *autocorrelation* (Koutsoyiannis, 2003).

Penelitian ini menggunakan model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan. Model sistem persamaan simultan yang dibangun terdiri atas 26 persamaan meliputi; 18 persamaan struktural dan 8 persamaan identitas. Model tersebut dibagi ke dalam tiga blok meliputi blok (1) fiskal, (2) permintaan agregat, dan (3) kinerja perekonomian.

Model ekonometrika dengan sistem persamaan simultan yang dibangun adalah:

Blok Fiskal

Penerimaan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah

$$PAD_{it} = PAJD_{it} + RETD_{it} + BUMD_{it} + PADL_{it} \quad (1)$$

2. Pajak Daerah

$$PAJD_{it} = a_0 + a_1TPGPD_{it} + a_2INVS_{it} + a_3LPAJD_{it} + u_1 \quad (2)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $a_1, a_2, a_3, a_4 > 0$

3. Retribusi Daerah

$$RETD_{it} = b_0 + b_1PDRB_{it} + b_2TPGPD_{it} + b_3POP_{it} + b_4LRETD_{it} + u_2 \quad (3)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $b_1, b_2, b_3, b_4 > 0$

4. Dana Alokasi Umum

$$DAU_{it} = c_0 + c_1PNS_{it} + c_2LDK_{it} + c_3POP_{it} + c_4INFL_{it} + u_3 \quad (4)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $c_1, < 0$; $c_2, c_3, c_4, c_5 > 0$

5. Dana Bagi Hasil

$$DBH_{it} = d_0 + d_1 POP_{it} + d_2 TREN_{it} + d_3 INFL_{it} + d_4 LDBH + u_4 \quad (5)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $d_1, d_2, d_3 > 0$

6. Total Penerimaan Daerah

$$TPD_{it} = PAD_{it} + DAU_{it} + DBH_{it} + DAK_{it} + PLD_{it} \quad (6)$$

Pengeluaran Daerah

7. Pengeluaran Belanja Pegawai

$$BPGW_{it} = e_0 + e_1 PNS_{it} + e_2 DAU_{it} + e_3 TREN_{it} + e_4 LBPGW_{it} + u_5 \quad (7)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $e_1, e_2, e_3, e_4 > 0$

8. Pengeluaran Belanja Barang dan Jasa

$$BBJ_{it} = f_0 + f_1 DAU_{it} + f_2 DBH_{it} + f_3 LBBJ_{it} + u_6 \quad (8)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $f_1, f_2, f_3, f_4 > 0$

9. Pengeluaran Belanja Modal

$$BMD_{it} = g_0 + g_1 PAD_{it} + g_2 DBH_{it} + g_3 DAK_{it} + g_4 LBMD_{it} + u_7 \quad (9)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $g_1, g_2, g_3, g_4 > 0$

10. Belanja Sosial (BSOS)

$$BSOS_{it} = h_0 + h_2 PAD_{it} + h_2 LDK_{it} + h_3 MISK_{it} + h_4 TREN_{it} + h_5 LBL_{it} + u_8 \quad (10)$$

Parameter estimates of the expected: $h_1, h_2, h_3, h_4 > 0$

11. Total Pengeluaran Pemerintah Daerah

$$TPGPD_{it} = BPGW_{it} + BBJ_{it} + BMD_{it} + BSOS_{it} \quad (11)$$

I. Blok Permintaan Agregat Daerah

1. Pengeluaran Konsumsi Swasta

$$KONS_{it} = i_0 + i_1 PDRB_{it} + i_2 BPGW_{it} + i_3 INFL_{it} + i_4 LKONS_{it} + u_9 \quad (12)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $i_1, i_2, i_3, i_4, > 0$; $i_4 < 0$

2. Investasi Swasta

$$INVS_{it} = i_0 + i_1 BMD_{it} + i_2 PAJD_{it} + i_3 KONS_{it} + i_4 SBI_{it} + i_5 LINVSW_{it} + u_{10} \quad (13)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $i_1, i_3, i_5 > 0$; $i_2, i_4 < 0$

3. Ekspor Daerah

$$EXPD_{it} = j_0 + j_1 NTRP_{it} + j_2 INFL + j_3 LEXPD_{it} + u_{11} \quad (14)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $j_1, j_3 < 0$; $j_2, j_4 > 0$

4. Impor Daerah

$$IMPD_{it} = k_0 + k_1 NTRP_{it} + k_2 INVS_{it} + k_3 LIMP_{it} + u_{12} \quad (15)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $k_1, k_2, k_3 > 0$

5. Ekspor bersih

$$NEXP = EXPD_{it} - IMPD_{it} \quad (16)$$

Blok Kinerja Perekonomian

1. PDRB Sektor Pertanian

$$PDRBSP_{it} = m_0 + m_1 INVS_{it} + m_2 KONS_{it} + m_3 LPDRBSP_{it} + u_{13} \quad (17)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $m_1, m_2, m_3, > 0$

2. PDRB Sektor Industri dan Perdagangan

$$PDRBIP_{it} = n_0 + n_1 INVS_{it} + n_2 NEXP_{it} + n_3 LPDRBIP_{it} + u_{14} \quad (18)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $n_1, n_3, > 0$; $n_2 < 0$

3. PDRB Sektor Lainnya

$$\text{PDRBSL}_{it} = o_0 + o_1 \text{PTKNP}_{it} + o_2 \text{INVS}_{it} + o_3 \text{BBTBL}_{it} + o_4 \text{INF}_{it} + o_4 \text{LPDRBSL}_{it} + u_{15} \quad (19)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $o_1, o_2, o_3, o_4, > 0$

4. Produk Domestik Regional Bruto

$$\text{PDRB}_{it} = \text{PDRBSP}_{it} + \text{PDRBIP}_{it} + \text{PDRBSL}_{it} \quad (20)$$

5. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian

$$\text{PTKSP}_{it} = p_0 + p_1 \text{AKK}_{it} + p_2 \text{INVS}_{it} + p_3 \text{LPTKSP}_{it} + u_{16} \quad (21)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $p_1, p_2, p_3 > 0$

6. Penyerapan Tenaga Kerja Sektor non Pertanian

$$\text{PTKNP}_{it} = q_0 + q_1 \text{INVS}_{it} + q_2 \text{UMP}_{it} + q_3 \text{SBI}_{it} + q_4 \text{INFL}_{it} + q_3 \text{LPTKNP}_{it} + u_{17} \quad (22)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $q_1, q_5, > 0; q_2, q_3, q_4, < 0$

7. Total Penyerapan Tenaga Kerja

$$\text{PTK}_{it} = \text{PTKSP}_{it} + \text{PTKNP}_{it} \quad (23)$$

8. Pengangguran

$$\text{UNEP}_{it} = \text{AKK}_{it} - \text{PTK}_{it} \quad (24)$$

9. Kemiskinan

$$\text{MISK}_{it} = r_0 + r_1 \text{IPM}_{it} + r_2 \text{INVS}_{it} + r_3 \text{BSOS}_{it} + r_4 \text{ITK}_{it} + r_5 \text{LMISK}_{it} + u_{18} \quad (25)$$

parameter estimasi yang diharapkan: $r_2, r_5 > 0; r_1, r_3, r_4 < 0$

Identifikasi Model

Identifikasi model ditentukan atas dasar "order condition" sebagai syarat keharusan dan "rank condition" sebagai syarat kecukupan. Kendati suatu persamaan memenuhi order condition, mungkin saja persamaan ini tidak teridentifikasi. Karena itu dalam proses identifikasi diperlukan suatu syarat perlu sekaligus syarat cukup (Koutsoyiannis, 2003).

Dengan mengikuti prosedur identifikasi yang telah diuraikan di atas, maka dari model dampak kebijakan fiskal terhadap kemiskinan kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat diketahui, bahwa jumlah *predetermined variables* adalah 56, sedangkan jumlah persamaan (G) adalah 24 yang terdiri dari 18 persamaan struktural dan 6 persamaan identitas sehingga $K = 56, M = 5$ dan $G = 25$, maka $K - M = 56 - 5 = 51$ dan $G - 1 = 25 - 1 = 24$, maka $(K - M) > (G - 1)$ ($51 > 24$). Oleh karena itu berdasarkan kriteria *order condition* maka persamaan dinyatakan teridentifikasi secara berlebih (*over identified*) sehingga dapat diduga parameter-parameternya.

Metode Pendugaan Model

Dari hasil identifikasi model, maka model dinyatakan *over identified*, sehingga dalam penelitian ini pendugaan model dilakukan dengan metode 2SLS (*two stage least squares*) karena metode 2SLS cocok untuk persamaan simultan yang *over identified*, dapat digunakan pada jumlah sampel yang relatif sedikit dan tidak sensitif terhadap modifikasi (*respesifikasi*) model, baik untuk analisis struktural maupun untuk analisis simulasi dan

peramalan. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program software komputer SAS versi 9.0.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Estimasi Model Ekonometrika

Hasil estimasi model ekonometrika yang terdiri atas 3 blok secara keseluruhan menunjukkan hasil yang cukup baik. Nilai koefisien determinasi (R^2) masing-masing persamaan struktural dalam model relatif tinggi, yaitu 16 persamaan memiliki koefisien determinasi (R^2) di atas 0.50 dan hanya dua persamaan yang memiliki nilai koefisien determinasi (R^2) di bawah 0.50. Di samping itu sebagian variabel penjelas (*explanatory variable*) yang digunakan memiliki pengaruh nyata terhadap variabel endogen, dimana pada umumnya memiliki tanda yang sesuai dengan teori atau hipotesis yang dikemukakan. Walaupun ada beberapa variabel penjelas yang tandanya tidak sesuai dengan teori, namun pengaruhnya tidak nyata secara statistik.

Hasil Estimasi Blok Fiskal Daerah

Dalam penelitian ini, blok fiskal daerah dibagi ke dalam dua sub blok yaitu sub blok penerimaan pemerintah daerah, dan sub blok pengeluaran pemerintah daerah. Dalam model ini penerimaan daerah, yang dimasukkan sebagai persamaan struktural yaitu; pajak daerah, retribusi daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil.

Pajak Daerah

Hasil pendugaan model persamaan pajak daerah sebagai sumber utama penerimaan daerah dalam era otonomi dewasa ini, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,9553. Pajak daerah dipengaruhi secara nyata dan positif oleh pajak daerah tahun sebelumnya. Sementara jumlah kendaraan bermotor dan total pengeluaran pemerintah memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap rertibusi daerah dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan retribusi daerah menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.87455. Retribusi daerah dipengaruhi secara nyata dan positif oleh total pengeluaran pemerintah daerah, jumlah penduduk dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Sementara PDRB memiliki tanda positif namun tidak berpengaruh nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap rertibusi daerah dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan dana alokasi umum sebagai sumber utama penerimaan daerah dalam era otonomi dewasa ini, menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.87213. Dana Alokasi Umum (DAU) dipengaruhi secara nyata dan positif oleh jumlah pegawai negeri sipil, jumlah penduduk, dan inflasi. Sementara luas daerah

kabupaten/kota berpengaruh negatif namun tidak nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap dana alokasi khusus dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan dana bagi hasil menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.2259. Dana bagi hasil (DBH) dipengaruhi secara nyata dan positif oleh Dana bagi hasil tahun sebelumnya, dan tren. Sementara jumlah penduduk dan inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap dana alokasi khusus dalam jangka pendek.

Pengeluaran Pemerintah Daerah

Dalam penelitian ini pengeluaran pemerintah daerah kabupaten kota dikelompokkan dalam lima kelompok yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja sosial, belanja pendidikan, dan belanja lain-lain. Pengeluaran daerah, yang dimasukkan sebagai persamaan struktural yaitu; belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja sosial.

Hasil pendugaan model persamaan belanja pegawai menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.87781. Belanja pegawai dipengaruhi secara nyata dan positif oleh jumlah pegawai negeri sipil, dan belanja daerah tahun sebelumnya. Sementara dana alokasi umum dan tren berpengaruh positif namun tidak nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja pegawai dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan belanja barang dan jasa

menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.64122. Belanja barang dan jasa dipengaruhi secara positif dan nyata alokasi umum, dan belanja barang dan jasa tahun sebelumnya. Sementara dana bagi hasil memiliki tanda positif, tetapi tidak berpengaruh nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja barang dan jasa dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan belanja modal menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.6512. Belanja modal dipengaruhi secara positif dan nyata oleh dana alokasi khusus, dan belanja modal tahun sebelumnya, sementara pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil berpengaruh positif namun tidak berpengaruh nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan belanja sosial menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.4380. Persamaan belanja sosial dipengaruhi secara nyata dan positif terhadap tren, dan belanja sosial tahun sebelumnya. Sementara, pendapatan asli daerah, luas daerah, dan jumlah penduduk miskin berpengaruh positif namun tidak nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Kerangka Blok Permintaan Agregat

Dalam penelitian ini blok permintaan agregat terdiri atas, pengeluaran konsumsi swasta, investasi swasta, ekspor dan impor daerah, serta pengeluaran

pemerintah. Khusus tentang pengeluaran pemerintah telah dijelaskan dalam sub bahasan blok fiskal sehingga tidak dijelaskan lagi dalam pokok bahasan ini. Hasil estimasi model blok permintaan agregat dapat dilihat pada Tabel 4.

Hasil pendugaan model persamaan konsumsi swasta menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9926. Persamaan konsumsi swasta, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh produk domestik regional bruto, inflasi, dan konsumsi swasta tahun sebelumnya. Sementara belanja pegawai berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap konsumsi swasta. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek

Hasil pendugaan model persamaan investasi swasta menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.7534. Persamaan investasi swasta, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh konsumsi swasta, dan investasi swasta tahun sebelumnya. Sementara belanja modal berpengaruh positif dengan namun tidak nyata terhadap investasi. Pada sisi lain suku bunga bank Indonesia dan pajak daerah berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap investasi swasta. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek

Hasil pendugaan model persamaan ekspor daerah menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9923. Persamaan ekspor daerah, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh ekspor daerah tahun sebelumnya. Sementara inflasi

berpengaruh positif dengan namun tidak nyata terhadap ekspor daerah. Pada sisi lain nilai tukar rupiah dan pajak daerah berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap investasi swasta. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan impor daerah menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9399. Persamaan impor daerah, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh impor daerah tahun sebelumnya. Sementara nilai tukar rupiah dan investasi swasta berpengaruh positif dengan namun tidak nyata terhadap impor daerah. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Kerangka Blok Kinerja Perekonomian

Dalam penelitian ini kinerja perekonomian diukur dengan, produk domestik regional bruto, penyerapan tenaga kerja dan kemiskinan. Produk domestik regional bruto dibagi kedua tiga sektor, produk domestik regional bruto sektor pertanian, produk domestik regional bruto sektor industri dan perdagangan, serta produk domestik regional bruto sektor lainnya. Sementara penyerapan tenaga kerja daerah dibagi dalam dua persamaan yaitu, penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian.

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9829. Persamaan produk domestik regional bruto sektor

pertanian, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh produk domestik regional bruto sektor pertanian tahun sebelumnya. Sementara investasi swasta dan konsumsi berpengaruh positif dengan namun tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor pertanian. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor industri dan perdagangan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9979. Persamaan produk domestik regional bruto sektor industri dan perdagangan, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh produk domestik regional bruto sektor industri dan perdagangan tahun sebelumnya. Sementara investasi swasta dan ekspor bersih berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor industri dan perdagangan. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan produk domestik regional bruto sektor lainnya nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9608. Persamaan produk domestik regional bruto sektor lainnya, dipengaruhi secara nyata dan positif oleh produk domestik regional bruto sektor lainnya tahun sebelumnya, penyerapan tenaga kerja non pertanian, dan dana demonstrasi dan tugas perbantuan. Sementara investasi swasta dan inflasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap produk domestik regional bruto sektor lainnya. Semua

parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.92174. Persamaan penyerapan tenaga kerja sektor pertanian, dipengaruhi secara nyata dan positif penyerapan tenaga kerja sektor pertanian tahun sebelumnya. Sementara angkatan dan investasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9642. Persamaan penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian, dipengaruhi secara nyata dan positif penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian tahun sebelumnya dan inflasi. Sementara investasi berpengaruh positif namun tidak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja sektor non pertanian. Pada sisi lain suku bunga bank Indonesia, dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif namun hanya suku bunga bank Indonesia yang berpengaruh nyata. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Hasil pendugaan model persamaan kemiskinan menunjukkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.9787. Persamaan kemiskinan dipengaruhi secara nyata dan positif oleh jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya. Pada sisi lain indeks

pembangunan manusia berpengaruh negatif dan nyata terhadap kemiskinan. Sementara investasi berpengaruh negatif namun tidak nyata terhadap kemiskinan. Pada sisi lain pengeluaran belanja sosial berpengaruh positif terhadap kemiskinan, hal tersebut

mengindikasikan bahwa belanja sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada 10 kabupaten kota yang ada tidak berjalan sesuai yang diharapkan. Semua parameter tidak responsif terhadap belanja modal sektor pertanian dalam jangka pendek.

Tabel 3 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Fiskal Daerah

| Persamaan Pajak Daerah (PAJD) | | | | | | |
|-----------------------------------|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| Peubah | Estimasi | Prob>[T] | Elastisitas | | F-hitung | Adj R-Sq |
| | | | J. Pendek | J. Panjang | | |
| Intercept | -432,473 | 0,2885 | - | - | 398.63 | 0.95287 |
| INVS | 0,000784 | 0,7032 | 0,0422 | 0,47342 | | |
| TPGPD | 0,002363 | 0,4177 | 0,1685 | 1,88884 | | |
| LPAJD | 0,91079 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan Retribusi Daerah (RETD) | | | | | | |
| Intercept | -1221,94 | 0,0169 | - | - | 95.86 | 0.86543 |
| PDRB | 0,000093 | 0,7654 | 0,0289 | 0,0780 | | |
| TPGPD | 0,006006 | 0,097 | 0,3475 | 0,9396 | | |
| POP | 0,004289 | 0,0291 | 0,3804 | 1,0284 | | |
| LRETD | 0,63017 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan Dana Alokasi Umum (DAU) | | | | | | |
| Intercept | 50040,94 | <,0001 | - | - | 93.78 | 0.86283 |
| PNS | 6,87569 | 0,0002 | 0,2833 | - | | |
| POP | 0,09795 | <,0001 | 0,2157 | - | | |
| LDK | 5,13099 | 0,2294 | 0,0423 | - | | |
| INFL | 11,62142 | 0,0144 | 0,0667 | - | | |
| Persamaan Dana Bagi Hasil (DBH) | | | | | | |
| Intercept | 5730,866 | 0,0338 | - | - | 4.01 | 0.16958 |
| POP | 0,003187 | 0,3508 | 0,0662 | 0,0996 | | |
| TREN | 6,054066 | 0,0337 | 0,0016 | 0,0024 | | |
| INFL | 0,873658 | 0,5877 | 0,0472 | 0,0711 | | |
| LDBH | 0,335976 | 0,0865 | - | - | | |
| Persamaan Belanja Pegawai (BPGW) | | | | | | |
| Intercept | -2858,20 | 0.6956 | - | - | 106.96 | 0.87781 |
| PNS | 6,500859 | 0.0137 | 0,3841 | 0,7061 | | |
| DAU | 0,117260 | 0.3036 | 0,1768 | 0,325 | | |
| TREN | 1264,718 | 0.1099 | 0,0497 | 0,0914 | | |
| LBPGW | 0,456075 | 0.0003 | - | - | | |
| Persamaan Barang dan Jasa (BBJ) | | | | | | |
| Intercept | -345,167 | 0,939 | - | - | 36.15 | 0.64122 |
| DAU | 0,056535 | 0,0851 | 0,2879 | 1,0567 | | |
| DBH | 0,150413 | 0,5684 | 0,0813 | 0,2983 | | |
| LBBJ | 0,727526 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan Belanja Modal (BMD) | | | | | | |
| Intercept | 7577,556 | 0,3895 | - | - | 25.19 | 0.62120 |
| DBH | -0,29327 | 0,6452 | -0,0755 | -0,1009 | | |
| DAK | 2,091216 | <,0001 | 0,6820 | 0,9118 | | |
| PAD | 0,117387 | 0,7475 | 0,0212 | 0,0283 | | |

| | | | | | | |
|--|----------|--------|---------|---------|-------|---------|
| LBM | 0,252016 | 0,0304 | - | - | | |
| Persamaan Belanja Sosial (BSOS) | | | | | | |
| Intercept | 11433,3 | 0,0009 | - | - | | |
| PAD | 0,24372 | 0,2240 | 0,1387 | 0,2372 | | |
| LDK | 0,72109 | 0,7756 | 0,0455 | 0,0779 | 10.20 | 0.43804 |
| MISK | 0,010214 | 0,8265 | 0,0281 | 0,0481 | | |
| TREN | -1627,68 | 0,0023 | -0,3416 | -0,5841 | | |
| LBSOS | 0,415167 | 0,0010 | - | - | | |

Tabel 4 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Permintaan Agregat Daerah

| Persamaan Konsumsi Swasta (KONS) | | | | | | |
|--|------------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| Peubah | Estimasi | Prob>[T] | Elastisitas | | F-hitung | Adj R-Sq |
| | | | J. Pendek | J. Panjang | | |
| Intercept | -22942,3 | 0,0830 | - | - | | |
| PDRB | 0,040764 | 0,1043 | 0,0682 | 1,6648 | | |
| BPGW | 0,079756 | 0,7299 | 0,0121 | 0,2948 | 1980.27 | 0.9926 |
| INFL | 45,3730 | 0,0001 | 0,0565 | 1,3793 | | |
| LKONS | 0,959011 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan Investasi Swasta (INVS) | | | | | | |
| Intercept | 19070,62 | 0.6958 | - | - | | |
| BMD | 0,1333 | 0.5027 | 0,1765 | 0,3147 | | |
| PAJD | -2,1265 | 0.3122 | -0,0395 | -0,0704 | 37.04 | 0.7534 |
| KONS | 0,1269 | 0.0060 | 0,5382 | 0,9598 | | |
| SBI | -29,9594 | 0.2745 | -0,2126 | -0,3792 | | |
| LINVS | 0,4393 | 0.0065 | - | - | | |
| Persamaan Ekspor Daerah (EXPD) | | | | | | |
| Intercept | 118016,6 | 0,1571 | - | - | | |
| NTRP | -13,095800 | 0,1844 | -0,4846 | -10,3716 | 2539.10 | 0.9923 |
| INFL | 2,090327 | 0,9253 | 0,0059 | 0,1256 | | |
| LEXP | 0,953277 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan Impor Daerah (IMPD) | | | | | | |
| Intercept | -103803 | 0,1415 | - | - | | |
| NTRP | 11,7245 | 0,1085 | 0,5776 | 12,5505 | 308.43 | 0.9399 |
| INVS | 0,08516 | 0,3053 | 0,0602 | 1,3087 | | |
| LIMPD | 0,953974 | <,0001 | - | - | | |

Tabel 5 Hasil Estimasi Parameter Persamaan Kinerja Perekonomian

| Persamaan PDRB Sektor Pertanian (PDRBSP) | | | | | | |
|--|----------|----------|-------------|------------|----------|----------|
| Peubah | Estimasi | Prob>[T] | Elastisitas | | F-hitung | Adj R-Sq |
| | | | J. Pendek | J. Panjang | | |
| Intercept | -3413,53 | 0.6871 | - | - | | |
| INVS | 0,056605 | 0.5784 | 0,0183 | 0,6289 | 1128.74 | 0.98286 |
| KONS | 0,012944 | 0.6041 | 0,0177 | 0,197 | | |
| LPDRBSP | 0,909992 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan PDRB Sektor Industri dan Perdagangan (PDRBIP) | | | | | | |
| Intercept | -4691,75 | 0,3934 | - | - | 9127.56 | 0.99785 |

| | | | | | | |
|---|-----------|--------|---------|----------|--------|---------|
| INVS | 0,082069 | 0,0300 | 0,0431 | 0,6009 | | |
| NEXP | 0,035025 | 0,4456 | 0,0092 | 0,1279 | | |
| LPDRBIP | 0,928301 | <,0001 | - | - | | |
| Persamaan PDRB Sektor Lainnya (PDRBSL) | | | | | | |
| Intercept | -4604,43 | 0,7327 | - | - | | |
| PTKNP | 0,543087 | 0,0195 | 0,2026 | 1,5975 | | |
| INVS | 0,095209 | 0,2704 | 0,0454 | 0,3575 | 289.82 | 0.96075 |
| DDTBL | 1,111414 | 0,0778 | 0,0350 | 0,2757 | | |
| INFL | 15,923870 | 0,2071 | 0,0401 | 0,3160 | | |
| LPDRBSL | 0,873156 | <.0001 | - | - | | |
| Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (PTKSP) | | | | | | |
| Intercept | -685,574 | 0.7998 | - | - | | |
| AKK | 0,051184 | 0.1848 | 0,0985 | 0,7861 | 232.62 | 0.92174 |
| INVS | 0,018785 | 0.3559 | 0,0418 | 0,3339 | | |
| LPTKSP | 0,874683 | <.0001 | - | - | | |
| Persamaan Penyerapan Tenaga Kerja non Pertanian (PTKNP) | | | | | | |
| Intercept | 35615,89 | 0,1437 | - | - | | |
| INVS | 0,024905 | 0,1187 | 0,0745 | 2,6857 | | |
| UMP | -0,03366 | 0,1382 | -0,4622 | -16,6602 | 318.46 | 0.96416 |
| SBI | -20,22700 | 0,0994 | -0,4294 | -15,4802 | | |
| INFL | 7,80626 | 0,0281 | 0,1234 | 4,4484 | | |
| LPTKNP | 0,972259 | <.0001 | - | - | | |
| Persamaan Kemiskinan (MISK) | | | | | | |
| Intercept | 74802,88 | 0,0574 | - | - | | |
| IPM | -1061,54 | 0,0563 | -1,6108 | -75,6272 | | |
| INVS | -0,00296 | 0,7772 | -0,0089 | -0,4194 | 543.63 | 0.97872 |
| BSOS | 0,055686 | 0,5585 | 0,0202 | 0,9497 | | |
| PTK | -0,01812 | 0,3891 | -0,0428 | -2,011 | | |
| LMISK | 0,978701 | <.0001 | - | - | | |

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil analisis yang telah dilakukan tentang dampak kebijakan fiskal terhadap perekonomian kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah terutama belanja modal berpengaruh positif terhadap investasi swasta. Selanjutnya investasi swasta berpengaruh positif dan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja

dan kemiskinan pada 10 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan

2. Hasil estimasi model menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM), investasi swasta dan penyerapan tenaga kerja berpengaruh positif dalam menurunkan angka kemiskinan, namun hanya indeks pembangunan manusia yang berpengaruh nyata terhadap penurunan angka kemiskinan. Berbeda halnya dengan jumlah penduduk miskin tahun sebelumnya berpengaruh nyata dalam meningkatkan angka kemiskinan, sementara belanja sosial berpengaruh positif dalam meningkatkan angka kemiskinan, hal tersebut menunjukkan bahwa,

belanja sosial yang digunakan oleh pemerintah daerah paling tidak banyak yang tidak tepat sasaran.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka beberapa implikasi kebijakan dapat dilakukan yaitu:

1. Hasil estimasi dan simulasi kebijakan fiskal menunjukkan bahwa peningkatan belanja modal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah daerah dengan keterbatasan anggaran pendapatan belanja daerah, perlu melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk digunakan dalam meningkatkan belanja modal untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, sarana pendidikan, kesehatan, dan air bersih guna menarik para investor untuk menanamkan modalnya.
2. Hasil estimasi dan simulasi menunjukkan bahwa investasi swasta merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu mengambil kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong tumbuh kembangnya investasi swasta di daerah, termasuk di dalamnya memberi stimulus terhadap berkembangnya sektor swasta dengan memberi pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi berkembangnya sumber-sumber pendanaan mandiri bagi masyarakat dan peningkatan belanja modal dalam upaya untuk membangun dan memperbaiki infrastuktur di daerahnya, serta promosi investasi baik di dalam maupun di luar negeri.
3. Pemberdayaan kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian terutama di daerah perdesaan perlu lebih ditingkatkan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi urbanisasi dan sekaligus meningkatkan diversifikasi ekonomi perdesaan agar pilihan usaha bagi masyarakat di perdesaan lebih beragam. Dengan berkembangnya kegiatan ekonomi luar pertanian di perdesaan, maka pasar bagi hasil-hasil pertanian akan semakin terbuka, dan pada gilirannya akan memacu pertumbuhan sektor pertanian di perdesaan. Apabila kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka diharapkan dapat mengurangi pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan yang banyak terdapat di daerah perdesaan.
4. Kurang responsifnya kebijakan fiskal terhadap penurunan jumlah penduduk miskin, menunjukkan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah daerah belum sepenuhnya berpihak pada penduduk miskin. Oleh karena itu untuk meningkatkan respons dari kebijakan, maka sebaiknya pemerintah daerah perlu lebih berpihak dan fokus serta diperlukan kebijakan yang bersifat langsung dan produktif yang ditujukan pada masyarakat miskin dan rawan pangan

khususnya pada buruh dan petani gurem dengan melakukan program pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, N.A. Achsani, M. Tambunan, S.A. Mulyo. 2012. Impact of Fiscal Policy on the Agricultural Development in an Emerging Economy: Case Study from the South Sulawesi, Indonesia. *International Research Journal of Finance and Economics*. 96:101-112.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan. 2012. Sulawesi Selatan Dalam Angka. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, Makassar.
- Dornbursh, R., S. Fisher, and R. Startz. 2008. *Macroeconomics*. Tenth Edition. McGraw-Hill Book Company, Tokyo.
- Gemmell, N. and R. Kneller. 2002. Fiscal Policy Impacts on Growth in the OECD: Are They Long- or Short-Run. University of Nottingham, UK. http://www.ucm.es/info/ecap2/seminario/seminario05.06/Ismael_Sanz.
- Koutsoyiannis, A. (2003). *Theory of Econometrics*. 2nd edition. Pp 681. New York: Palgrave publishers.
- McCann, P. 2001. *Urban and Regional Economics*. Oxford University Press Inc. New York.
- Romer, D. 2001. *Advanced Macroeconomics*, Second Edition, McGraw-Hill Book Company Co, Singapore.
- Sen, A. K. 1981. *Poverty and Famines. An Essay on Entitlements and Deprivation*. Basil Blackwell, Oxford.
- Todaro, M.P. 2009, *Economic Development*. Tenth Edition. Addison Wesley Longman, Inc. New York
- Usman. 2006. Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Distribusi Pendapatan dan Tingkat Kemiskinan. Tesis Magister Sains. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- World Bank. 2007. *Desentralisasi Fiskal dan Kesenjangan Daerah: Kajian Pengeluaran Publik Indonesia* 2007. <http://siteresources.worldbank.org/Intindonesia/Resources/226271-1168333550999>.
- Yodhoyono, S.B. 2004. *Pembangunan Pertanian dan Perdesaan Sebagai Upaya Mengatasi Kemiskinan dan Pengangguran: Analisis Ekonomi Politik Kebijakan Fiskal*. Disertasi Doktor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.